

## PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK WILAYAH HUKUM ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jafar Abdul Azis<sup>1</sup>, Ali Azhar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia.  
aazis2364@gmail.com<sup>1</sup>, aliazharunisi28@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract (Bahasa Inggris)

*Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) are an important part of the democratic process in Indonesia which gives the people the right to directly elect regional leaders. One aspect of concern in regional elections is the use of campaign props, which often involve violations of applicable regulations, both in terms of placement, size and content of campaign materials. This research aims to analyze the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing the law and providing sanctions for violations of the use of campaign props in Indragiri Hilir Regency. Using a qualitative approach, this research explores Bawaslu's supervision of the installation of campaign props, as well as the effectiveness of sanctions applied to violations that occur. The research results show that although Bawaslu has played an active role in supervising the installation of campaign props, limited human resources and coordination between institutions are the main challenges in law enforcement. Apart from that, giving sanctions which often only consist of warnings or removing teaching aids is considered less effective in providing a deterrent effect to violators. This research suggests that Bawaslu should strengthen coordination with related agencies and evaluate sanctions policies to increase the effectiveness of supervision and law enforcement in the upcoming regional elections.*

### Kata Kunci: (3-5 kata)

Bawaslu,  
penegakan hukum,  
sanksi,  
alat peraga kampanye,  
Pilkada,  
Kabupaten Indragiri Hilir.

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam Pilkada adalah penggunaan alat peraga kampanye, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik dari sisi penempatan, ukuran, maupun isi materi kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga kampanye, serta efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah berperan aktif dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Selain itu, pemberian sanksi yang sering kali hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Penelitian ini menyarankan agar Bawaslu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan mengevaluasi kebijakan sanksi untuk meningkatkan

---

efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada mendatang.

---

*Corresponding Author:*

Jafar Abdul Azis<sup>1</sup>, Ali Azhar<sup>2</sup>

Program Pascasarjana Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

aazis2364@gmail.com<sup>1</sup>, aliazharunisi28@gmail.com<sup>2</sup>

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan salah satu pilar demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penegakan aturan kampanye yang adil dan transparan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam Pilkada adalah penggunaan alat peraga kampanye, yang sering kali menjadi sumber pelanggaran, baik dari sisi penempatan, ukuran, maupun isi yang dapat mempengaruhi opini publik secara tidak sah.

Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya proses Pemilu, termasuk dalam Pilkada. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilu atau Pilkada mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan alat peraga kampanye. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Wilayah hukum administrasi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari provinsi Riau, menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan Pilkada. Seperti halnya di daerah lainnya, Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami permasalahan terkait dengan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi terkait alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di wilayah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Bawaslu dalam memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini juga akan melihat efektivitas dari pemberian sanksi dan bagaimana dampaknya terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memberikan hak suara langsung kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Pilkada bukan hanya sekadar ajang pemilihan, tetapi juga sebuah proses yang harus berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Salah satu aspek yang cukup sensitif dan sering kali menjadi titik permasalahan dalam Pilkada adalah pelaksanaan kampanye, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye sering kali menjadi sarana untuk mempromosikan calon kepala daerah, namun dalam prakteknya, penggunaan alat peraga ini seringkali melanggar ketentuan yang ada, seperti ketidaksesuaian penempatan, ukuran, dan konten yang terkandung di dalamnya, yang dapat memberikan pengaruh yang tidak sah terhadap opini publik dan merusak integritas proses Pilkada itu sendiri.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga agar Pilkada dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya proses Pemilu, termasuk Pilkada, untuk memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah penggunaan alat peraga kampanye yang harus dipasang dengan cara yang adil, tidak melanggar norma, dan tidak memberikan keuntungan yang tidak sah bagi salah satu pihak. Peran Bawaslu ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tujuan menciptakan suasana Pilkada yang bersih dan adil.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai bagian dari Provinsi Riau, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Meskipun wilayah ini memiliki potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, namun masih banyak ditemui permasalahan terkait dengan pelaksanaan kampanye, terutama dalam hal penggunaan alat peraga. Alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sering kali menjadi masalah yang mengganggu ketertiban dan keadilan dalam Pilkada di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait alat peraga kampanye, serta tantangan apa saja

yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam penggunaan alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu aspek penting yang akan dianalisis adalah pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, apakah sanksi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana implementasi sanksi dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan Pilkada yang lebih baik di masa depan, serta menciptakan Pilkada yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Indragiri Hilir dengan subjek penelitian meliputi anggota Bawaslu, peserta Pilkada, dan masyarakat terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, observasi lapangan untuk memantau pelaksanaan kampanye, serta studi dokumentasi terkait peraturan dan laporan pengawasan. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara dan lembar observasi.

Untuk memastikan validitas data, digunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna yang muncul dari data yang terkumpul. Teknik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Bawaslu dan efektivitas sanksi terhadap alat peraga kampanye di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 3. PEMBAHASAN

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Salah satu aspek yang menjadi fokus pengawasan adalah penggunaan alat peraga kampanye, yang dapat mempengaruhi opini publik secara langsung dan memengaruhi hasil Pemilu. Dalam konteks Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir, alat peraga kampanye sering menjadi sumber pelanggaran, baik dalam hal penempatan yang tidak sesuai ketentuan, ukuran yang melebihi batas, hingga penggunaan materi yang mengandung ujaran kebencian atau kampanye negatif.

Peran Bawaslu dalam penegakan hukum terkait alat peraga kampanye dimulai dari pengawasan terhadap tahapan kampanye yang meliputi pemantauan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai alat peraga kampanye. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis, penghapusan alat peraga yang melanggar, hingga sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang cukup luas. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu dengan instansi terkait seperti KPU, kepolisian, dan pemerintah daerah juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tanpa adanya kerjasama yang solid, pengawasan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye dapat menjadi kurang maksimal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Bawaslu juga sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan aturan terkait alat peraga kampanye yang melibatkan kepentingan politik peserta Pilkada. Beberapa pihak seringkali mencoba mengabaikan aturan demi meraih dukungan lebih besar, seperti melakukan kampanye melalui alat peraga yang melanggar aturan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa memihak pada pihak manapun.

Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran alat peraga kampanye juga perlu dipertimbangkan efektivitasnya. Terkadang, sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera kepada pelanggar, terutama jika sanksi tersebut hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga tanpa ada konsekuensi hukum yang lebih berat. Hal ini mengharuskan adanya evaluasi terhadap kebijakan sanksi yang ada, untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan cukup memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum.

Di sisi lain, pengawasan terhadap alat peraga kampanye bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai aturan. Masyarakat yang terlibat dalam Pilkada, baik sebagai pemilih atau pengawas independen, diharapkan turut aktif melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Hal ini akan membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap alat peraga kampanye di Pilkada Serentak Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan pentingnya pengawasan yang transparan dan adil. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas dapat menciptakan Pilkada yang lebih bermartabat dan mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Ke depan, perbaikan dalam koordinasi, sumber daya, dan efektivitas sanksi perlu diperhatikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka dengan cara demokratis. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan, salah satunya adalah penggunaan alat peraga kampanye yang dapat menciptakan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat krusial dalam menjaga agar kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya melalui pengawasan terhadap alat peraga kampanye.

#### **Peran Bawaslu dalam Pengawasan Alat Peraga Kampanye**

Bawaslu memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada, salah satunya adalah pengawasan terhadap penggunaan alat peraga kampanye. Berdasarkan peraturan yang berlaku, alat peraga kampanye harus dipasang di tempat yang telah ditentukan, tidak melebihi ukuran yang telah diatur, dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi atau menghasut masyarakat. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta Pilkada mematuhi ketentuan-ketentuan ini, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan kampanye yang terkait dengan alat peraga.

Pengawasan terhadap alat peraga kampanye dilakukan Bawaslu melalui berbagai metode, mulai dari pemantauan lapangan hingga penggunaan laporan dari masyarakat dan pengawas pemilu yang terlibat. Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti KPU dan kepolisian, untuk memastikan bahwa alat peraga yang dipasang sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga dapat melibatkan masyarakat secara langsung untuk membantu pengawasan di tingkat desa atau kecamatan, sehingga pelanggaran terkait alat peraga dapat terdeteksi lebih cepat.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar proses Pilkada berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu aspek pengawasan yang krusial adalah terhadap penggunaan alat peraga kampanye, yang sering kali menjadi sumber pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Pengawasan terhadap alat peraga kampanye mencakup beberapa aspek, seperti penempatan yang sesuai dengan lokasi yang ditentukan, ukuran yang tidak melebihi ketentuan, dan isi yang tidak mengandung unsur provokasi atau ajakan yang bisa mengganggu ketertiban publik.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu menggunakan berbagai metode pengawasan, mulai dari pemantauan langsung di lapangan hingga mengandalkan laporan dari masyarakat dan pengawas pemilu. Pemantauan lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan regulasi yang ada, sedangkan laporan dari masyarakat sering kali menjadi sumber informasi yang penting dalam mendeteksi pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu bekerja sama dengan instansi lain seperti KPU dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat penindakan terhadap pelanggaran.

Salah satu metode yang penting adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan alat peraga kampanye, terutama di tingkat desa atau kecamatan. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas dan detail, serta mempercepat proses identifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Keberhasilan pengawasan Bawaslu dalam konteks ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada.

Namun, meskipun sudah ada berbagai metode yang digunakan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah yang luas. Pengawasan manual sering kali menemui kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah tertentu, sehingga teknologi dan sistem pelaporan digital bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap alat peraga

kampanye di Pilkada Serentak. Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif dan pemberian sanksi yang tegas oleh Bawaslu akan sangat menentukan keberhasilan Pilkada yang adil dan transparan.

### **Tantangan yang Dihadapi Bawaslu dalam Penegakan Hukum**

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait alat peraga kampanye. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari banyak kecamatan dan desa, yang menyulitkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara maksimal di setiap sudut daerah. Keterbatasan jumlah pengawas di lapangan menyebabkan beberapa pelanggaran alat peraga kampanye mungkin tidak terdeteksi pada waktunya.

Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara Bawaslu dengan KPU, pemerintah daerah, dan pihak kepolisian juga menjadi hambatan dalam proses pengawasan. Dalam beberapa kasus, meskipun ada pelanggaran yang jelas terlihat di lapangan, keterlambatan atau kurangnya koordinasi antara instansi-instansi tersebut dapat memperlambat proses penindakan. Misalnya, adanya perbedaan interpretasi tentang lokasi yang sah untuk pemasangan alat peraga atau keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang.

Keterlibatan kepentingan politik dalam Pilkada juga dapat menjadi tantangan serius bagi Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum. Banyak pihak yang terlibat dalam kampanye, baik dari calon kepala daerah maupun partai politik, berusaha memanfaatkan alat peraga kampanye untuk menarik perhatian pemilih, bahkan jika itu berarti melanggar aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, alat peraga yang dipasang di tempat yang tidak sesuai atau penggunaan gambar yang berlebihan. Tekanan politik yang datang dari calon peserta Pilkada atau partai politik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bawaslu, meskipun lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait alat peraga kampanye, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup signifikan, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah yang sangat luas, dengan banyaknya kecamatan dan desa yang tersebar di berbagai titik. Dengan kondisi geografis yang demikian, pengawasan secara langsung terhadap pemasangan alat peraga kampanye di setiap wilayah menjadi sangat sulit dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah pengawas di lapangan membuat Bawaslu kesulitan untuk menjangkau seluruh area yang menjadi tanggung jawabnya, dan beberapa pelanggaran yang terjadi bisa tidak terdeteksi tepat waktu. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi dalam pelaksanaan pengawasan dan membuat sejumlah pelanggaran tidak tercatat atau tertangani dengan baik.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif juga menjadi salah satu hambatan besar dalam penegakan hukum. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberi sanksi terhadap pelanggaran, proses koordinasi yang lambat atau tidak maksimal dengan instansi terkait seperti KPU, kepolisian, dan pemerintah daerah sering kali menghambat proses pengawasan. Misalnya, jika terdapat pelanggaran yang jelas terlihat di lapangan, tetapi laporan tentang pelanggaran tersebut terlambat disampaikan kepada pihak yang berwenang atau ada perbedaan interpretasi tentang batas-batas wilayah yang sah untuk pemasangan alat peraga kampanye, maka tindakan yang diambil bisa terlambat. Dalam beberapa kasus, perbedaan persepsi antar lembaga tentang penegakan aturan dan ketidakjelasan mekanisme pelaporan turut memperburuk proses penindakan pelanggaran yang ada.

Selain masalah administratif dan koordinasi, tantangan lain yang cukup besar adalah keterlibatan kepentingan politik dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam sistem demokrasi yang kompetitif, alat peraga kampanye sering kali menjadi sarana yang sangat penting bagi calon kepala daerah dan partai politik untuk menarik perhatian pemilih. Hal ini kadang memunculkan praktik pelanggaran, baik yang bersifat tidak sengaja maupun yang disengaja, untuk mendapatkan dukungan lebih besar. Misalnya, pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan atau penggunaan gambar calon yang berlebihan dan mendominasi ruang publik. Para peserta Pilkada dan partai politik terkadang tidak segan-segan melanggar aturan kampanye untuk memenangkan dukungan pemilih, bahkan jika itu berarti melanggar ketentuan yang ada. Tekanan politik yang datang dari calon kepala daerah atau partai politik yang memiliki kekuatan politik yang besar juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bawaslu, meskipun Bawaslu seharusnya bersikap independen dan tegas dalam menegakkan hukum. Tekanan tersebut dapat muncul dalam bentuk ancaman, lobi politik, atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pengawasan dan penegakan sanksi, yang dapat mengurangi efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan peserta Pilkada juga menjadi faktor yang memperburuk pengawasan terhadap alat peraga kampanye. Banyak peserta Pilkada dan tim kampanye yang kurang memahami atau sengaja mengabaikan ketentuan mengenai alat peraga kampanye, baik terkait dengan ukuran, lokasi, maupun isi. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran yang sering terjadi, yang tidak hanya merugikan pihak tertentu tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam Pilkada.

Masyarakat yang kurang paham mengenai hak dan kewajiban dalam Pilkada juga tidak jarang tidak melaporkan pelanggaran yang mereka temui di lapangan, sehingga memperburuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi, diperlukan penguatan kapasitas Bawaslu, baik dari segi jumlah pengawas yang memadai maupun peningkatan fasilitas dan teknologi yang dapat mendukung proses pengawasan secara lebih efisien. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pengawasan kampanye berbasis mobile atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye dapat membantu mengatasi masalah keterbatasan geografis dan sumber daya manusia. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, baik dalam hal pemahaman terhadap tugas masing-masing instansi maupun dalam hal penyampaian informasi yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intens mengenai aturan kampanye juga dapat memperkuat peran pengawasan masyarakat, sehingga potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih dini. Selanjutnya, independensi Bawaslu dalam menghadapi tekanan politik harus tetap dijaga, dan langkah-langkah yang lebih tegas perlu diambil untuk memastikan sanksi yang diberikan memiliki dampak yang cukup besar dalam mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap alat peraga kampanye pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi lebih efektif, dan proses Pilkada yang lebih transparan dan adil bisa tercipta.

#### **Pemberian Sanksi oleh Bawaslu**

Salah satu fungsi penting Bawaslu dalam pengawasan alat peraga kampanye adalah pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Berdasarkan peraturan yang ada, sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye dapat berupa peringatan tertulis, penghapusan alat peraga yang melanggar, atau sanksi administratif yang lebih berat. Dalam kasus tertentu, jika pelanggaran dianggap cukup berat atau mengancam jalannya Pilkada, Bawaslu dapat merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi lebih lanjut.

Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, efektivitas dari pemberian sanksi tersebut sering kali dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap alat peraga kampanye tidak mendapat penindakan yang memadai. Misalnya, meskipun ada laporan tentang pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga tanpa adanya konsekuensi hukum yang lebih tegas. Hal ini dapat membuat pelanggar merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi adalah pengawasan yang tidak menyeluruh. Jika pelanggaran alat peraga kampanye terjadi di daerah yang jauh atau sulit dijangkau, sanksi yang diterapkan bisa saja terlambat. Selain itu, jika pelanggar merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan sanksi yang cukup berat, mereka mungkin lebih cenderung untuk melanggar aturan kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, Bawaslu perlu mengevaluasi kebijakan sanksi yang ada, dengan tujuan agar sanksi yang diterapkan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran di masa depan.

Salah satu fungsi yang sangat penting bagi Bawaslu dalam pengawasan alat peraga kampanye adalah pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta Pilkada, baik calon kepala daerah maupun partai politik, mematuhi aturan yang ada guna menciptakan Pilkada yang adil dan transparan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye dapat berupa peringatan tertulis, penghapusan alat peraga yang melanggar, hingga sanksi administratif yang lebih berat, seperti denda atau pembatalan hasil kampanye tertentu. Dalam kasus pelanggaran yang sangat berat atau yang berpotensi mengancam jalannya Pilkada, Bawaslu juga dapat merekomendasikan sanksi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang, seperti KPU atau pemerintah daerah, yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Namun, meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup jelas dalam memberikan sanksi, efektivitas dari penerapan sanksi tersebut sering kali dipertanyakan. Kelemahan dalam penegakan hukum sering kali terlihat ketika pelanggaran terhadap alat peraga kampanye tidak mendapat penindakan yang memadai. Salah satu contoh konkret adalah meskipun ada laporan mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, sering kali sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga tanpa adanya konsekuensi hukum yang lebih tegas. Hal ini tentu saja mempengaruhi persepsi masyarakat dan peserta Pilkada mengenai keseriusan penegakan hukum oleh Bawaslu. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan, pelanggar mungkin merasa tidak takut atau tidak terpengaruh, sehingga tidak ada efek jera yang dihasilkan. Pada akhirnya, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pilkada itu sendiri.

Pengawasan yang tidak menyeluruh juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian sanksi. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah yang luas, dengan banyak kecamatan dan desa

yang harus dipantau oleh Bawaslu. Keterbatasan jumlah pengawas lapangan dan sulitnya mengakses beberapa daerah yang terpencil atau terisolasi menyebabkan pengawasan terhadap alat peraga kampanye tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau mungkin tidak terdeteksi tepat waktu, sehingga sanksi yang diterapkan terlambat. Keterlambatan ini berpotensi mengurangi dampak dari sanksi yang diberikan, karena pelanggaran sudah terjadi cukup lama sebelum ditindaklanjuti.

Selain itu, tekanan politik dari peserta Pilkada atau partai politik yang memiliki pengaruh besar juga dapat mempengaruhi efektivitas sanksi. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa pihak yang memiliki kekuatan politik atau sumber daya yang cukup besar dapat memanfaatkan posisinya untuk mencegah pemberian sanksi yang berat. Tekanan ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bawaslu dalam menegakkan aturan yang ada, dan pada gilirannya, dapat melemahkan integritas lembaga pengawas tersebut. Untuk itu, independensi Bawaslu dalam menghadapi tekanan politik sangatlah penting, agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Evaluasi kebijakan sanksi sangat diperlukan agar pemberian sanksi dapat lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menyesuaikan tingkat sanksi berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran ringan, seperti pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ukuran atau lokasi yang tidak strategis, sanksi seperti peringatan atau penghapusan alat peraga bisa dianggap cukup. Namun, untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti pemasangan alat peraga di tempat yang sangat mengganggu ketertiban umum atau pemasangan alat peraga yang mengandung unsur provokasi, sanksi yang lebih berat, seperti denda atau bahkan pembatalan hasil kampanye, perlu dipertimbangkan.

Selain itu, sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih terintegrasi juga perlu dibangun, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, aplikasi pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh masyarakat atau pengawas Pemilu di tingkat desa atau kecamatan dapat membantu Bawaslu dalam memantau pelanggaran alat peraga kampanye secara lebih cepat dan menyeluruh. Hal ini juga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada.

Bawaslu juga perlu untuk lebih memperkuat sosialisasi mengenai aturan kampanye kepada masyarakat dan peserta Pilkada. Pemahaman yang baik tentang aturan kampanye dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran, karena peserta Pilkada dan masyarakat akan lebih sadar akan kewajiban mereka untuk mematuhi ketentuan yang ada. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, baik secara langsung melalui kampanye atau melalui media sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas pemberian sanksi, Bawaslu perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang lebih tegas dan independen dalam menghadapi tekanan politik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada, sehingga pelanggaran terkait alat peraga kampanye dapat diminimalkan dan proses Pilkada dapat berlangsung lebih adil dan transparan.

#### **Peran Masyarakat dalam Pengawasan**

Selain peran Bawaslu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan alat peraga kampanye. Masyarakat di tingkat desa atau kecamatan yang melihat adanya pelanggaran dapat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu atau pihak terkait. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat penindakan terhadap pelanggaran. Hal ini juga mendukung terciptanya Pilkada yang lebih transparan dan adil.

Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas tambahan yang membantu Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan di tingkat bawah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat juga dapat membantu menekan praktik-praktik kampanye yang tidak sesuai aturan.

Selain peran Bawaslu yang sangat vital dalam pengawasan penggunaan alat peraga kampanye, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menciptakan Pilkada yang adil dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya kampanye, khususnya terkait dengan penggunaan alat peraga kampanye, memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masyarakat yang berada di tingkat desa atau kecamatan memiliki akses yang lebih langsung terhadap kegiatan kampanye yang berlangsung di sekitar mereka, sehingga mereka dapat dengan cepat mendeteksi adanya pelanggaran dan melaporkannya kepada Bawaslu atau pihak yang berwenang. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga membantu memperluas cakupan pengawasan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil atau sulit dijangkau oleh pengawas yang ditunjuk oleh Bawaslu.

Masyarakat sebagai pengawas tambahan dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang mungkin terlewatkan oleh pengawas resmi. Mereka dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai lokasi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai atau pelanggaran lainnya yang terjadi di tingkat lokal. Kehadiran masyarakat dalam pengawasan ini juga dapat menjadi bentuk partisipasi demokratis yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara merasa memiliki tanggung jawab terhadap jalannya pemilihan umum yang jujur dan transparan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan dan sosialisasi tentang aturan kampanye yang berlaku sangatlah penting. Sosialisasi yang baik dapat mengedukasi masyarakat mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi terkait alat peraga kampanye, seperti pemasangan di tempat yang tidak sesuai, penggunaan gambar yang berlebihan, atau penyebaran materi kampanye yang mengandung unsur provokasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan, masyarakat akan lebih peka terhadap pelanggaran yang terjadi dan lebih berani untuk melaporkannya. Peningkatan kesadaran hukum ini juga akan menekan praktik-praktik kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu cara untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bawaslu dapat menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye secara langsung, baik melalui aplikasi mobile maupun media sosial. Sistem pelaporan yang mudah diakses akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan pelanggaran yang mereka temui, yang pada gilirannya mempercepat penindakan dan memperluas jangkauan pengawasan. Teknologi ini juga memungkinkan Bawaslu untuk memantau pelaporan secara real-time dan mengkoordinasikan tindak lanjut yang lebih cepat.

Selain itu, kerja sama antara Bawaslu dan masyarakat harus terjalin dengan baik untuk memastikan laporan yang diterima adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara melaporkan pelanggaran dengan benar dan akurat, serta memberikan penghargaan atau apresiasi bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menjaga integritas Pilkada. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan proaktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.

Peran masyarakat dalam pengawasan kampanye juga dapat menjadi mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya laporan dan pengawasan yang lebih menyeluruh dari masyarakat, pelanggaran yang terjadi akan lebih cepat terungkap dan ditindaklanjuti, sehingga calon kepala daerah dan partai politik yang terlibat dalam kampanye akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas kampanye mereka. Transparansi dan keterbukaan dalam proses Pilkada akan tercipta ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam pengawasan jalannya Pemilu.

Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat ini akan memperkuat demokrasi lokal, karena masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan akan merasa lebih bertanggung jawab atas proses pemilihan yang berlangsung. Rasa memiliki terhadap Pilkada dan keterlibatan dalam menjaga kesucian pemilu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pemimpin daerah yang benar-benar representatif dan dipilih secara sah oleh rakyat.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dalam pengawasan alat peraga kampanye sangatlah penting dalam memastikan keberlangsungan Pilkada yang jujur dan adil. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas tambahan yang bekerja sama dengan Bawaslu dapat memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan. Diperlukan upaya bersama antara Bawaslu, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan iklim kampanye yang bersih dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merusak prinsip demokrasi.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

### **4.1 Kesimpulan**

Secara keseluruhan, peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir sangat vital dalam menciptakan pemilu yang adil dan demokratis. Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang optimal, dan tekanan politik, lembaga ini tetap berusaha menjalankan tugas pengawasannya sebaik mungkin. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran alat peraga kampanye perlu diperkuat agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye akan semakin memperkuat sistem pengawasan yang ada, menjadikan Pilkada lebih bersih dan transparan.

### **4.2 Saran/Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia Bawaslu dengan penambahan jumlah pengawas dan pelatihan intensif. Kedua, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait seperti KPU, kepolisian, dan

pemerintah daerah untuk mempercepat penindakan pelanggaran. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan sistem pemberian sanksi, seperti penerapan sanksi administratif yang lebih tegas, perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kampanye melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pengawasan digital, juga dapat mempercepat pelaporan dan pemantauan alat peraga kampanye, serta mengatasi kendala geografis di wilayah yang luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat lebih transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan alat peraga kampanye agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bawaslu melakukan pengawasan dengan berbagai cara, termasuk pemantauan lapangan, laporan dari masyarakat, dan kerja sama dengan instansi terkait seperti KPU dan kepolisian.

Tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia, wilayah yang luas, serta koordinasi yang kurang optimal dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, tekanan politik dari peserta Pilkada juga seringkali mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pemberian sanksi.

Pemberian sanksi oleh Bawaslu terhadap pelanggaran alat peraga kampanye belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan seringkali hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga tanpa adanya konsekuensi yang lebih berat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan sanksi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan alat peraga kampanye. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan mengawasi kampanye di tingkat lokal dapat mempercepat deteksi pelanggaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Prospek penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan sistem pengawasan yang lebih modern, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk memantau dan melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye. Penelitian juga dapat mengkaji lebih dalam tentang pengaruh sanksi administratif yang lebih tegas dalam menekan pelanggaran, serta bagaimana peningkatan koordinasi antara lembaga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam Pilkada mendatang.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada, perlu ada pembaruan dalam sistem sanksi, peningkatan kapasitas Bawaslu, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

## REFERENSI

- Azhari, M. (2020). *Peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye pada Pilkada serentak 2020*. Jurnal Hukum Pemilu, 15(2), 45-59.
- Badan Pengawas Pemilu. (2023). *Pedoman pengawasan alat peraga kampanye dalam Pilkada*. Badan Pengawas Pemilu. <https://www.bawaslu.go.id/produk-hukum/pedoman-pengawasan-kampanye>
- Hasanah, I., & Subhan, M. (2022). *Sanksi administratif dalam penegakan hukum pada Pilkada: Studi kasus di Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Administrasi Negara, 20(3), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jadn.2022.02567>
- Mulyadi, A. (2021). *Pengawasan pemilu di daerah: Tantangan dan solusi dalam penegakan hukum alat peraga kampanye*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 28(4), 72-88.
- Samsudin, S., & Oktaviani, T. (2020). *Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum Pilkada serentak di Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 16(1), 98-113. <https://doi.org/10.2345/jhd.2020.00432>